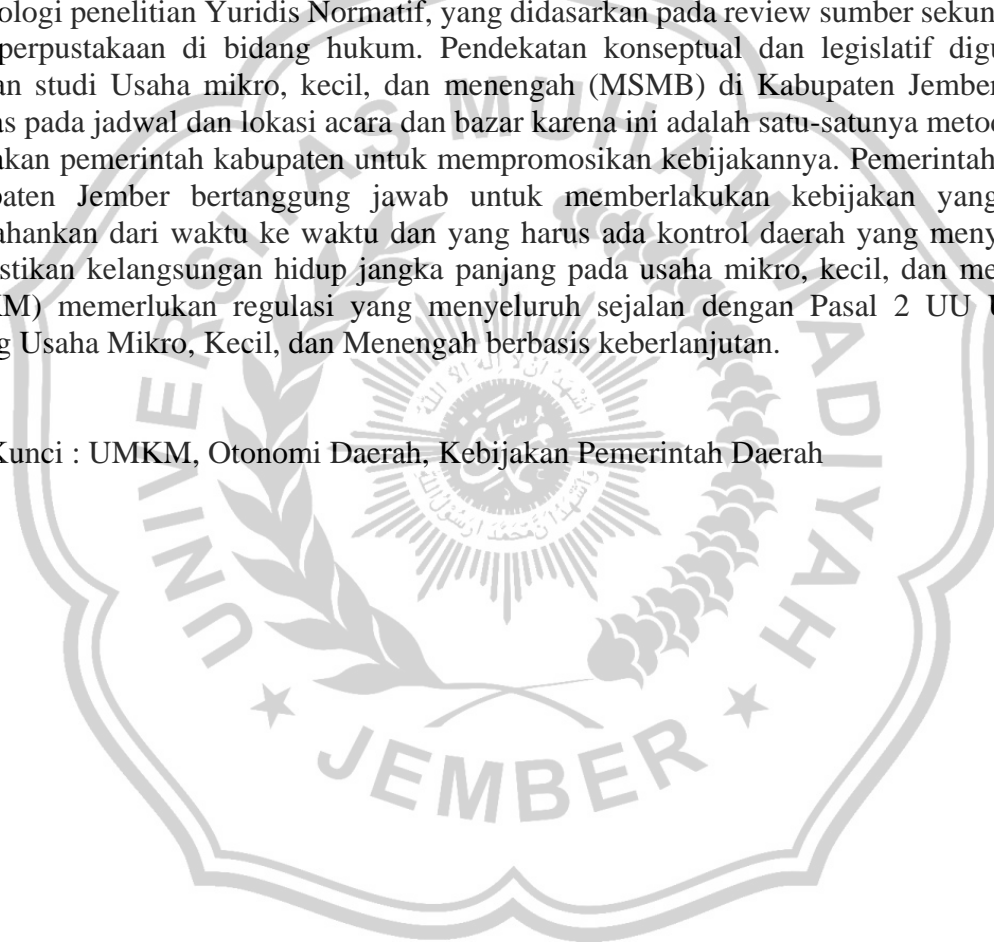


ABSTRAK

Kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dikenal sebagai "otonomi daerah", dan itu adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintah federal. Pasal 12 UU Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki tugas yang didukung oleh tindakan nyata dalam memperluas koperasi, industri dan perdagangan, investasi, dll. Untuk memastikan bahwa UKM mendapatkan prioritas, kepastian, peluang, perlindungan, dan dukungan berdasarkan keberlanjutan, pemerintah daerah harus memberdayakan UKM secara sinergis dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang di berbagai bidang kehidupan ekonomi. pasal 2 UMKM. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif, yang didasarkan pada review sumber sekunder dan buku perpustakaan di bidang hukum. Pendekatan konseptual dan legislatif digunakan. Temuan studi Usaha mikro, kecil, dan menengah (MSMB) di Kabupaten Jember masih terbatas pada jadwal dan lokasi acara dan bazar karena ini adalah satu-satunya metode yang digunakan pemerintah kabupaten untuk mempromosikan kebijakannya. Pemerintah daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk memberlakukan kebijakan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu dan yang harus ada kontrol daerah yang menyeluruh. Memastikan kelangsungan hidup jangka panjang pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan regulasi yang menyeluruh sejalan dengan Pasal 2 UU UMKM tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis keberlanjutan.

Kata Kunci : UMKM, Otonomi Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah



ABSTRACT

The power to manage its own governmental affairs is known as "regional autonomy", and it is a transfer of power from the federal government. Article 12 of the Regional Government Law explains that district and municipal administrations must have duties backed by real actions in expanding cooperatives, industries and commerce, investment, etc. To ensure that SMEs get priority, certainty, opportunities, protection, and support based on sustainability, regional governments must empower SMEs in a synergistic fashion by establishing policies and laws in different areas of economic life. article 2 MSMEs. This study employs Normative Juridical research methodology, which is based on reviewing secondary sources and library books in the field of law. A conceptual and legislative approach is used. Study findings Micro, small, and medium-sized businesses (MSMBs) in the Jember district are still confined to the schedule and location of events and bazaars since this is the sole method the district administration uses to promote its policies. The regional administration of Jember Regency is responsible for enacting policies that may be sustained over time and for which there must be thorough regional control. Ensuring long-term viability in micro, small, and medium-sized enterprises (MSME) requires thorough regulation in line with Article 2 of the MSME Law on Micro, Small, and Medium Enterprises based on sustainability

Keywords : UMKM, Regional Autonomy, Regional Government Policy

